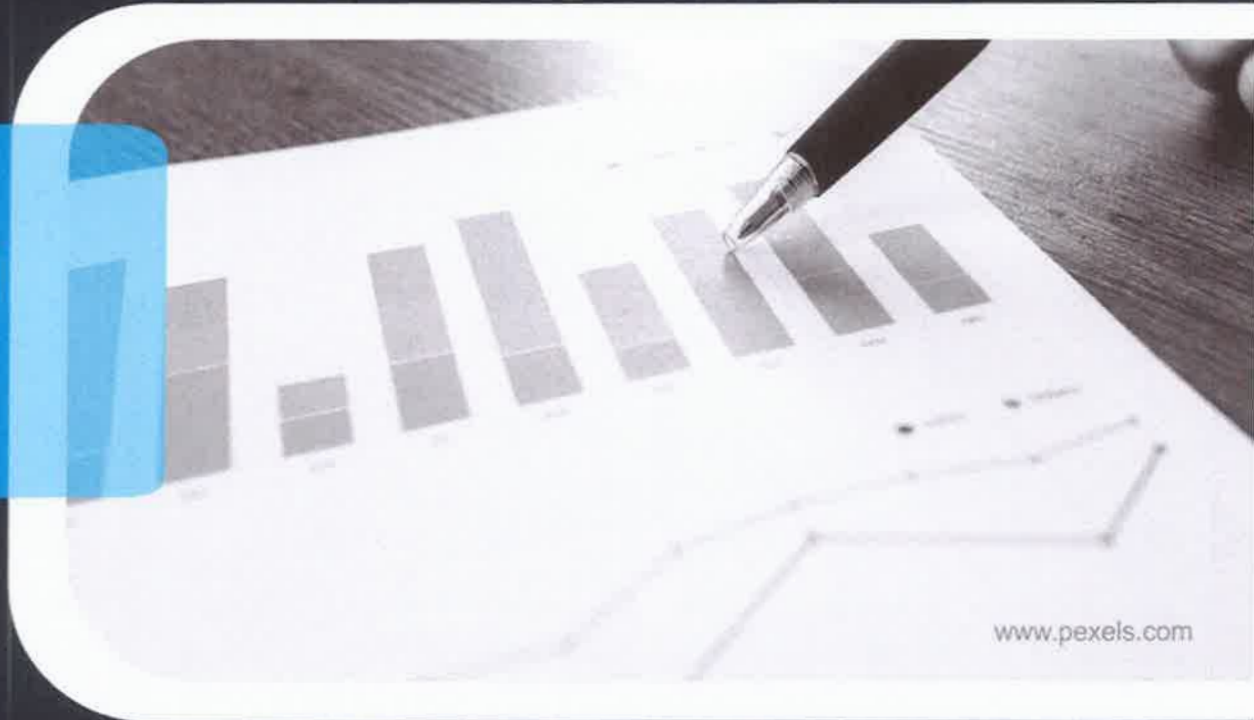


Rencana Kerja Tahunan

2020



Ombudsman Republik Indonesia
www.ombudsman.go.id



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. UMUM

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Kementerian/Lembaga | : 110 - Ombudsman RI |
| 2. Program | : 01 - Program Dukungan Manajemen
06 - Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
| 3. Sasaran Program | : 01 - Terselenggaranya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat
06 - Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 4. Kegiatan | : 5618 – Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat
5619 – Pencegahan Maladministrasi
5731 - Penjaminan Mutu
4051 – Perencanaan dan Keuangan
4191 – Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik
4192 – Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi
4193 – Pengawasan Internal
5093 – Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi
5094 – Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan |
| 5. Unit Organisasi | : Ombudsman Republik Indonesia |

6. Sasaran Kegiatan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target
5618	Terlaksananya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang efektif	Rata-rata waktu penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat	Hari	150
		Persentase penyelesaian laporan/pegaduan masyarakat	%	70
5619	Terlaksananya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Instansi penyelenggara pelayanan publik yang memperoleh Opini tertinggi	Instansi	2
		Persentase Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	%	70
		Indeks Persepsi Maladministrasi	Indeks	6
5731	Terimplementasinya Mutu Baku dan Kinerja Pelayanan Penyelesaian Laporan dan Pencegahan Maladministrasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Persentase aduan terhadap jumlah laporan	%	3
		Rata-rata Lama Penyelesaian Aduan	Hari	40

4051	Terlaksananya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas	Indeks kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	3,0
4191	Terlaksananya layanan fasilitasi pelayanan teknis terhadap Ombudsman RI yang berkualitas	Indeks kinerja Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis	Indeks	3,0
4192	Terlaksananya layanan kehumasan, data, dan teknologi informasi yang berkualitas	Indeks kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Indeks	2,83
4193	Terlaksananya layanan pengawasan internal yang berkualitas	Indeks kinerja Inspektorat	Indeks	2,8
5093	Terlaksananya fasilitas layanan hukum, kerja sama, dan manajemen organisasi yang berkualitas	Indeks kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Indeks	2,8
5094	Terlaksananya pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang berkualitas	Indeks kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Indeks	2,8

7. Rincian Kegiatan

A. Pemetaan Kegiatan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2020 dan Prakiraan Maju)

Kode	Sasaran Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen	Target 2020			Alokasi 2020 (Rp juta)	Volume/Target		Prakiraan Kebutuhan (dalam juta rupiah)	
		Volume/Target	Satuan	Satuan Biaya		2021	2022	2021	2022
5618	Terlaksananya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang efektif				9.897.160.000				
5618.001	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	3854	Laporan		9.897.160.000	6300	6600	16.956.600.000	18.183.956
5618.001.001	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke ORI Pusat yang diselesaikan	402	Laporan		3.545.452.000	630	660	5.813.000.000	6.182.545.000
5618.001.002	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke ORI Perwakilan yang diselesaikan	3496	Laporan		6.351.708.000	5697	5940	11.143.600.000	12.001.411.000
5619	Terlaksananya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik				2.051.278.000			34.296.184.000	35.899.836.000
5619.001	Survei Kepatuhan K/L/Pemda terhadap Pelaksanaan UU/25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	N/A	Instansi		269.050.000	587	587	17.850.000.000	18.742.500.000
5619.002	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	7	Policy Brief		1.494.831.000	7	7	2.094.737.000	2.168.052.000
5619.003	Survei Indeks Persepsi Maladministrasi	N/A	Provinsi		1.300.000	34	34	3.500.000.000	3.675.000.000

5619.005	Perbaikan Penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok marjinal dan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T)	1	Instansi		58.097.000	10	10	1.035.000.000	1.071.225.000
5619.006	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik	19	Focal Point		228.000.000	19	19	414.000.000	428.490.000
5731	Terimplementasinya Mutu Baku dan Kinerja Pelayanan Penyelesaian Laporan dan Pencegahan Maladministrasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku				235.792.000			1.632.000.000	1.689.490.000
5731.001	Manajemen Mutu Pelayanan Ombudsman RI	70	Laporan	235.792.000	235.792.000	88	93	1.632.000.000	1.689.490.000
5731.001.001	Pelaksanaan Manajemen Mutu Pelayanan Ombudsman RI			71.280.000	71.280.000				
5731.001.002	Pengendalian Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat			164.512,000	164.512,000				
5731.001.003	Pengendalian Mutu Pencegahan Maladministrasi								
4051	Terlaksananya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas				1.846.254.000			5.100.000.000	5.360.000.000

4051.952	Layanan Perencanaan	1	Layanan		134.626.000	1	1	600.000.000	630.000.000
4051.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		1.235.712.000	1	1	2.400.000.000	2.520.000.000
4051.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan		475.916.000	1	1	600.000.000	630.000.000
4191	Terlaksananya layanan fasilitasi pelayanan teknis terhadap Ombudsman RI yang berkualitas				319.598.000			1.350.000.000	1.425.000.000
4191.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan		319.598.000	1	1	1.350.000.000	1.425.000.000
4192	Terlaksananya layanan kehumasan, data dan teknologi informasi yang berkualitas				2.388.251.000			8.035.000.000	9.122.000.000
4192.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan		2.143.163.000	1	1	5.530.000.000	5.832.000.000
4192.962	Layanan Umum	1	Layanan		80.388.000	1	1	430.000.000	640.000.000
4192.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		164.700.000	1	1	2.075.000.000	2.650.000.000

4193	Terlaksananya layanan pengawasan internal yang berkualitas				244.511.000			1.300.000.000	1.417.000.000
4193.965	Layanan Audit Internal	1	Layanan		244.511.000	1	1	1.300.000.000	1.417.000.000
5093	Terlaksananya fasilitasi layanan hukum, kerja sama, dan manajemen organisasi yang berkualitas				658.479.000			3.550.000.000	4.235.000.000
5093.957	Layanan Hukum	1	Layanan		164.947.000	1	1	800.000.000	880.000.000
5093.960	Layanan Manajemen Organisasi	1	Layanan		493.532.000	1	1	2.750.000.000	3.355.000.000
5094	Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan yang berkualitas				120.198.036.000			189.946.000.000	215.639.000.000
5094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan		1.611.912.000	1	1	20.000.000.000	28.000.000.000
5094.954	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	1	Layanan		1.018.870.000	1	1	1.500.000.000	1.552.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5094	Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan yang berkualitas	Generik	120.198.036.000										120.198.036.000
5094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Generik	1.611.912.000										1.611.912.000
5094.954	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Generik	1.018.870.000										1.018.870.000
5094.956	Layanan Manajemen Barang Milik Negara	Generik	117.505.000										117.505.000
5094.959	Layanan Protokoler	Generik	269.379.000										269.379.000
5094.962	Layanan Umum	Generik	212.545.000										212.545.000
5094.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Generik	975.463.000										975.463.000
5094.994	Layanan Perkantoran	Generik	115.992.362.000										115.992.362.000

Jakarta, 2020
Ketua Ombudsman RI,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph. D